

IMPLEMENTASI “KESAYAN IKANG PAPA NAHAN PRAYOJANA” DALAM ETIKA KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DI BALI

I Gusti Ngurah Suwetha, Dyah Puspita Ernawati

Fakultas Politik Pemerintahan IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, NTB

Email : dyah.poespita1968@gmail.com

ABSTRACT

The basic values of philosophy in an area that is almost forgotten, at the present time seems to be still relevant to be used to support the task, especially in governance, which is conducted by Government Leaders. Nowadays, The Government Leaders often get the attention from their own public regarding their government implementation. Apparently this issue needs an innovation and new strategy in implementing government programs, given the present political demands have been increasingly bold and very aggressive in appreciating the policy pursued by the government. Meanwhile, the Government leaders are still monotonous in implementing their policy.

In implementing that public demand, the government leaders need to understand the culture and tradition as local wisdom or local genius applies in their territory so that it is easy to integrate the policies made and desired by the government can be combined with local customs, culture and traditions, so in running the government and implementing government in the specific region can be implemented in accordance with the wishes and will of the local community.

Bali is very famous with its local culture, which is based on the traditional philosophical values they embrace. Government leaders in managing the government should always collaborate between government programs with their customs, traditions and local culture, which in their daily terms are called empowering local wisdom based on the philosophy of "Tri Hita Karana" in providing public services for the realization of prosperity for their people. A leader's job as contained in the Epic Ramayana, "Papa Ikang Kesayan Nahan Prayojana" which means; the tasks of a leader are realizing prosperity, peace and tranquility for his people.

Keywords: Government Leaders; Community Prosperity; Local wisdom

PENDAHULUAN

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi apapun bentuk organisasi itu, apakah organisasi pemerintah ataupun organisasi swasta, apakah itu organisasi tradisional maupun organisasi modern. Namun yang akan dibicarakan dalam tulisan ini, adalah kepemimpinan Pemerintahan (Melalui Pendekatan Berbasis Budaya Lokal), yang dilandasi oleh nilai-nilai filosofi suatu tradisi/bebiasaan. Dalam pelaksanaan tata

kelola pemerintahan beberapa waktu terakhir ini kondisi kepemimpinan pemerintahan selalu mendapat sorotan publik seiring dengan fenomena yang berkembang saat ini, dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan pemimpin pemerintahan, mengingat pemimpin mempunyai arti yang amat menentukan dalam tata kelola organisasi yang dipimpinnya, terutama organisasi pemerintahan.

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan,

khususnya kecakapan/ kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan - khususnya kecakapan-kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk pencapaian satu atau beberapa tujuan (Kartini Kartono, 2008).

Dari pernyataan tersebut, dinyatakan bahwa seorang pemimpin merupakan pribadi yang memiliki nilai lebih dari yang dipimpinnya, sehingga pemimpin yang bersangkutan mampu mempengaruhi orang lain, utamanya orang yang dipimpinnya. Dengan demikian seseorang yang tampil sebagai seorang pemimpin sangat dituntut harus memiliki kelebihan, apakah karena kecakapannya, atau karena penampilannya, karena sikapnya, karena tutur katanya, dan sebagainya sehingga orang-orang yang dipimpinnya mau mengikutinya.

Menurut Peter Drucker dalam bukunya *"The Practice of Management"* (Harper & Row, 1954 : 158) bahwa kepemimpinan tidak dapat diciptakan atau dipromosikan, tidak dapat diajarkan

ataupun dipelajari". Drucker percaya bahwa tugas suatu organisasi adalah "menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kualitas kepemimpinan yang potensial menjadi efektif. Dengan kata lain, sifat-sifat kepemimpinan adalah bagian dari susunan dasar seseorang".

Terlepas dari pandangan-pandangan itu, seorang pemimpin harus mempunyai hal-hal yang lebih dari yang dipimpinnya, yang mampu mempengaruhi terhadap orang-orang yang dipimpinnya, sehingga apa tujuan dari organisasi yang dipimpinnya bisa dicapai. Banyak pemimpin yang berhasil bukan karena dia menguasai ilmu pengetahuan, yang banyak kita jumpai pada organisasi-organisasi yang tradisional tetapi bisa juga berhasil karena dia memiliki kelebihan, terutama karena memiliki kepengikutan dan kelebihan tertentu di dalam memimpin yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga pemimpin yang bersangkutan mampu mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, serta menguasai ilmu pengetahuan (IPTEK), guna mendukung kemampuan yang telah ada dalam dirinya, yang sangat kental dalam tata kehidupan kemasyarakatan.

Bangsa Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan yang handal, seperti zaman kerajaan Majapahit dibawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk dengan

Maha Patih Gajah Mada, dengan wilayah kekuasaan sampai ke pulau Madagaskar, Philipina dan Tumasik (Singapura sekarang), mampu membawa nusantara ini dikenal oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam budaya kita cerita kepemimpinan dalam dunia pewayangan yang merupakan warisan budaya local terutama di Jawa–Bali terdapat beberapa model kepemimpinan yang patut dicontoh, antara lain kepemimpinan Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sahadewa, (*Panca Pandawa*), Bisma, Drona, Kresna, Kunti, Drupadi, Srikandi, (dalam epos Maha Baratha), kemudian dalam epos Ramayana, kepemimpinan yang dapat kita contoh adalah kepemimpinan ; Sri Rama, Laksmna, Bharata, Wibisana, Kumba Karna. Sifat-sifat kepemimpinan yang bersumber dari kedua epos besar ini melahirkan ajaran kepemimpinan “*Astha Bratha*” yang diimplementasikan dan dielaborasi dalam kepemimpinan Pancasila.

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini sangatlah kompleks, seorang pemimpin pemerintahan harus mampu berinovasi di dalam melaksanakan kegiatannya, juga dukungan staf sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugasnya itu. M. Ryaas Rasyid (1997 : 110) menyebutkan “mengingat begitu kompleks dan beratnya fungsi-fungsi dan tanggung jawab yang melekat pada keberadaan pemimpin dan

kepemimpinan agaknya, secara praktis terlalu berlebihan jika kita mengharap bahwa kombinasi dari semua kemampuan yang dituntut bagi penyelenggaraan fungsi dan tanggung jawab itu terkumpul dalam satu pribadi. Karenanya, penyelenggaraan hanya mungkin berlangsung secara efektif, jika peranan kepemimpinan diemban secara bersama oleh sejumlah orang yang berbeda posisi, beda tanggung jawab, serta intensitas keterlibatannya dalam pelaksanaan kebijakan dan proses pencapaian tujuan”.

Merunut pernyataan Rasyid kepemimpinan pemerintahan era sekarang mengemban beban tanggung jawab sangat berat dan kompleks, karena tuntutan rakyat cenderung tidak terstruktur di dalam menyampaikan aspirasinya, sehingga posisi pemimpin sangat riskan. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas harus didukung oleh staf yang kuat, yang memiliki keterampilan sesuai dengan kompetensinya masing-masing, dan bila perlu mampu memadukan dengan budaya lokal atau kearifan lokal (*local wisdom*) atau *local genius* yang dapat berkolaborasi di dalam mendukung dan melaksanakan tugas-tugas pemimpin pemerintahan untuk mencapai tujuannya.

Seorang pemimpin atau leader, harus pula memiliki strategi untuk mengimplementasikan tugas-tugasnya, terutama bagi pemimpin pemerintahan

memahami strategy yang perlu dilakukan. Dalam hal ini mungkin bisa kita kutip dari tulisan yang disajikan oleh Cynthia A. Montgomery, *Directur Of Research at Harvard Business School*, dalam bukunya “*The Strategist Be The Leader Your Business Needs*” yang antara lain menyebutkan ; “*That is why strategy and leadership must be reunited at the highest level of t and own organization. All leaders not just those who are here tonight must accept and own strategy as the heart of their responsibilities.*” (2012:13). Strategi dan kepemimpinan harus menyatu yang merupakan suatu cara atau seni tersendiri untuk melaksanakan tugas di dalam organisasi yang dipimpinnya, karena itu merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin. Untuk menerapkan strategi itu seorang pemimpin perlu mempunyai seni memimpin, seni memanaje, dan seterusnya guna dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Local wisdom (kearifan setempat), dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dalam disiplin antropologi dikenal istilah “*local genius*” yang diperkenalkan oleh Quaritch Wales. *Local genius* adalah sebagai *local wisdom*. (Sartini, 2004 : 111). Menurut Haryati

Soebadio (dalam Ayatrohaedi,1986 : 18), bahwa *local genius*, adalah juga *cultural identity*, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Sementara Moendarjito (dalam Ayatrohaedi, 1986:40), menyebutkan, bahwa unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang. Ciri-cirinya, adalah :

- a. Mampu bertahan terhadap budaya luar,
- b. Memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar,
- c. Mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli,
- d. Mempunyai kemampuan mengendalikan,
- e. Mampu memberi arah pada perkembangan budaya.

I Ketut Gobyah dalam “Berpijak pada Kearifan Lokal” di <http://www.balipos.co.id> disitasi 05/03/2018, bahwa kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai

keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup, meskipun bernilai lokal tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dianggap universal. Swarsi Geriya dalam “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali” di <http://www.balipos.co.id>, disitasi 05/03/2018, mengemukakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional³.

Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga. Pikiran Rakyat terbitan 6 Maret 2003 menjelaskan, bahwa tentang kearifan berarti ada yang memiliki kearifan (*al-‘addah al-ma’rifah*), yang dilawankan dengan *al-addah al-jahiliyyah*. Kearifan adat dipahami sebagai segala sesuatu yang didasarkan pengetahuan dan diakui serta dianggap baik oleh ketentuan agama. Adat kebiasaan pada dasarnya teruji secara alamiah dan niscaya bernilai baik, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang-ulang dan mengalami penguatan (*reinforcement*). Apabila suatu tindakan dianggap baik oleh masyarakat, maka ia tidak akan mengalami

penguatan secara terus menerus. Pergerakan secara alamiah terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung kebaikan. Adat yang tidak baik hanya akan terjadi apabila terjadi pemaksaan oleh penguasa.

Budaya lokal, adalah budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang menempati lokalitas atau daerah tertentu, yang berbeda dari budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berada di tempat yang lain. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan, budaya daerah sebagai “suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas atau kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya”.

Di Indonesia, istilah budaya lokal juga sering disepadankan dengan budaya etnik/sub etnik. Setiap suku bangsa, etnik, dan subetnik, memiliki kebudayaan yang mencakup tujuh unsur, yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian. Secara umum, kearifan lokal dianggap sebagai pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta sebagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam

pemenuhan kebutuhan mereka. Pengertian tersebut bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata, melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didambakan oleh umat manusia.

Bali, berdasarkan hasil pengamatan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerahnya selalu mengacu dan berpegang pada filosofi kehidupan masyarakat atau budaya Bali, yang bersumber pada ajaran Agama Hindu, yaitu "*Tri Hita Karana*" yang terdiri dari "*parhyangan*", "*pawongan*", dan "*palemahan*" di dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya dengan selaras, serasi dan seimbang. "*Parhyangan*" artinya ; bagaimana keselarasan dan keserasian hubungan manusia dengan Sang Pencipta/*Ida Sang Hyang Widi Wasa*/Tuhan Yang Maha Esa, "*pawongan*", artinya : hubungan harmonis antara manusia dengan manusia, atau masyarakat, kemudian "*palemahan*" artinya ; hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitar.

Hubungan yang harmonis antara ketiga hal tersebut diimplementasikan oleh masyarakat Bali dan pemerintah Bali dalam tata kelola pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakatnya,

yaitu : "*Mokshartam Jagaditha Ya Ca Itidharma*". (Tercapainya kesejahteraan masyarakat lahir bathin, yang didasari oleh aturan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan nilai-nilai kebenaran/ dharma, kejujuran, keadilan, ketransparanan, akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Inu Kencana Syafiie (2013:293) mengatakan masyarakat dan kebudayaan di Bali berkembang seiring dengan perkembangan unsur-unsur yang berasal dari budaya agama Hindu Jawa, terutama berasal dari perluasan pengaruh kekuasaan Kerajaan Singasari dan Majapahit. Menyimak pandangannya ini, akibat dari pengaruh budaya Hindu tersebut, pola kemasyarakatan dan sistem pemerintahan, sosial politik, sosial ekonomi/sosial kemasyarakatan, pertanian, berkesenian, dan tata kelola pemerintahannya sangat dipengaruhi oleh budaya Hindu tersebut.

Budaya sangat menentukan sikap atau prestise suatu etnis yang memiliki kebudayaan itu. Kalangan romantik elitis memandang, bahwa kebudayaan-lah yang menentukan puncak prestasi hidup manusia. (Chris Jenks, 2013:6). Dalam pengertian ini kebudayaan diartikan secara khusus sebagai hal-hal yang luar biasa dalam prestasi kreatif manusia. Masyarakat Bali sangat menghargai kebudayaan dan budaya dalam kehidupannya sehari-hari.

RUMUSAN MASALAH

Berbagai uraian dalam pendahuluan tentang kepemimpinan dan budaya lokal serta implementasinya dalam tata kelola pemerintahan di Bali, ditetapkan rumusan masalah tentang “Bagaimana implementasi kesayan ikang papa nahan prayojana dalam etika kepemimpinan pemerintahan di Bali ?”.

METODE PENELITIAN

Kajian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini, adalah studi pustaka dengan menggunakan pendekatan diskriptif analitis. Menurut Sugiyono (2007 : 112), yang dimaksud dengan :deskriptif analisis, adalah : “metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung melalui proses pengumpulan, penyusunan, dan penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang ada”.

Selanjutnya Cooper dalam Creswel (2012:44) menyebutkan tinjauan pustaka yang bersifat teoritis, yaitu peneliti fokus pada teori-teori dalam berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam kaitan ini, penulis mendeskripsikan kondisi yang ada dibandingkan dengan teori-teori yang mendukung. Kajian deskriptif analisis merupakan suatu metode atau prosedur

penelitian yang menggambarkan keadaan objek penelitian yang sedang berlangsung melalui serangkaian proses pengolahan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai filosofi pada kearifan local serta etika pada kepemimpinan pemerintahan, dalam tata kelola pemerintahan sangatlah dibutuhkan, oleh karena publik di era kebebasan saat ini sangat agresip dan “merdeka sekali” di dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Jangankan “salah” benar saja bertindak masyarakat selalu menilainya salah, lamban, abai, tidak hirau dan sebagainya. Kepemimpinan pemerintahan atau *leader governance*, adalah kemampuan seseorang sebagai pemimpin selain berkemampuan pemerintahan juga memiliki kemampuan mengambil putusan secara cepat, tepat, dan terukur serta memimpin tata pemerintahan yang baik, yaitu mengelola sumber daya menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi berdasarkan etika pemerintahan (Suradinata, Ermaya 2013:5). Sedangkan Ndraha, (2003:226) menyebutkan, Kepemimpinan pemerintahan, adalah terapan teori kepemimpinan dalam bidang pemerintahan. Mencermati dari pandangan ini, bahwa seorang pemimpin pemerintahan selain mempunyai keahlian

memimpin (*leader*), juga harus memiliki kemampuan tentang pemerintahan di dalam mengelola tata kelola pemerintahan, serta dapat memberdayakan sumber daya yang ada dalam tata kelola pemerintahan itu, dengan mengkolaborasikan dengan budaya setempat.

Selanjutnya Wirawan (2013:105-106) menyebutkan etika kepemimpinan, perilaku seorang pemimpin yang etis, antara lain : dapat dipercaya, menghargai dan menghormati orang lain, bertanggung jawab, adil, kewargaan organisasi (*organizational citizenship*), menggunakan kekuasaannya secara bijak, dan jujur. Atas dasar ini seorang pemimpin pemerintahan di dalam pelaksanaan tugasnya itu hendaknya mengacu pada apa yang dideskripsikan di atas, sehingga pemimpin pemerintahan yang bersangkutan benar-benar dapat menunjukkan etikanya kepada yang dipimpin.

Dari pandangan di atas, dan atas pengamatan penulis, di dalam pelaksanaan atau tata kelola pemerintahan di Bali, dapat dicermati etika kepemimpinan pemerintahan yang dijalankan didasari atas nilai-nilai filosofis dan budaya lokal (baca Hindu), sebagai berikut :

a. Filosofi *Tri Hita Karana* :

Di atas penulis sudah uraikan, bahwa filosofi ini merupakan pengaruh dari budaya Hindu, yang

bermakna tiga hal penyebab kesejahteraan bagi umat manusia, yaitu (1).*Parhyangan*, artinya ; hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, (2). *Pawongan*, artinya ; hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia sekitarnya (masyarakat sesama manusia), dan (3). *Palemahan*, artinya ; hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Ketiga hubungan ini dilaksanakan secara fleksibel sesuai dengan adat dan budaya setempat serta sesuai dengan *desa, kala patra*, (ruang, tempat dan waktu), sehingga filosofi ini bisa diaplikasikan mengacu pada ruang, tempat dan waktu, pada saat mana, di mana, dan untuk apa, secara selaras, serasi dan seimbang serta harmonis antara ketiganya itu.

Dengan filosofi ini pemimpin pemerintahan di Bali dalam melaksanakan program pemerintahan selalu didasari atas filosofi ini. Sehingga masyarakat bisa mengikuti dan bahkan ikut berperan aktif melaksanakan kegiatan program pemerintahan tersebut. Misalnya; di dalam melaksanakan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan

berkelanjutan menuju “*green government*” filosofi ini sangat tepat digunakan, dan juga dalam pembangunan bidang-bidang lainnya.

b. Tri Kaya Parisudha :

Tri Kaya Parisudha, merupakan suatu ajaran kesusilaan dan etika dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Hindu, yaitu; “**menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan**”, yang terdiri dari : (1). *Manacika parisudha*, artinya : berpikir yang baik dan benar, (2). *Wacika parisudha*, artinya : Berkata atau bertutur kata, berucap, yang baik dan benar, dan (3). *Kayika parisudha*, artinya : Berbuat, berperilaku, bertingkah, yang baik dan benar. Setiap orang dituntut untuk taat menuruti ajaran ini. Lebih-lebih seorang pemimpin pemerintahan, ini merupakan suatu etika yang bisa diadopsi dalam tata kelola pemerintahan. Jika bisa dan mampu menerapkan ajaran ini, dengan sendirinya pemimpin pemerintahan yang bersangkutan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, amoral, KKN, (korupsi, kolusi dan nepotisme) serta perbuatan amoral lainnya, oleh karena mulai dari berfikir, berkata, dan berbuat itu harus dalam satu kata, yang didasari oleh nilai-nilai kebenaran, kejujuran serta keterbukaan. Ajaran ini rupanya

sangat relevan untuk dasar pelaksanaan revolusi mental yang dicanangkan oleh Jokowi-JK.

c. Tri Warga :

Tri warga merupakan ajaran kerohanian yang diatur dalam Weda, dan jika seorang pimpinan pemerintahan/pejabat mentaati ajaran ini, niscaya mereka akan terhindar dari hal-hal yang melanggar norma-norma kesusilaan maupun norma hukum. Tidak sedikit pejabat pada masa kini tersandung masalah korupsi, tindakan amoral atau tindakan melawan hukum lainnya, akibat tidak memahami dan meyakini ajaran ini. Tri warga berarti tiga bagian ajaran rohani untuk mendapat “*moksa*” dan “*Jagaddhita*” yaitu kebebasan abadi di akhirat, bebasnya roh dari dosa dan keinginan hawa nafsu dan benda-benda duniawi. Tri warga terdiri dari :

- *Kama*, artinya ‘ keinginan hawa nafsu, naluri, birahi, yang sangat kuat yang mempengaruhi jiwa makhluk hidup terutama manusia.
- *Artha*, artinya ; benda atau harta yang dapat memuaskan naluri, keinginan, hawa nafsu tadi.
- *Dharma*, artinya ; ajaran-ajaran kerohanian dan budi pekerti yang luhur, yang penuh rasa kasih sayang terhadap mereka yang lagi dalam kesusahan dan menderita,

adil, melindungi, mengampuni, mengayomi, simpati terhadap semua orang, untuk mendapatkan “*Jagaddhita*” (kebahagiaan lahir bathin dunia-akhirat).

Tri warga, mengajarkan jika kita berkeinginan untuk memenuhi keinginan, hawa nafsu, birahi, hasrat untuk memenuhi/memiliki harta benda, (*kama*, dan *artha*) itu hendaknya dilakukan dan didasarkan atas *dharma* itu tadi, sehingga kita akan terhindar akan hal-hal yang melanggar hukum dan norma-norma lainnya. (Puniatmadja, Oka I.B. 1992:3-4).

d. *Kesayan Iking Papa Nahan Prayojana* ;

Epos Ramayana dalam kesusatraan Hindu telah menyumbangkan sebuah pemikiran sebagai pegangan, petunjuk, yang patut dipedomani oleh seorang pemimpin, lebih-lebih pemimpin pemerintahan. Kalimat tersebut termuat dalam kakawin Ramayana, yang berbunyi : “*Kesayan Iking Papa Nahan Prayojana*” (Ramayana Jawa Kuno, 24, 82 dalam Oka Puniatmaja I.B,1992). Kalimat ini tercetus, ketika Sri Rama memberikan wejangan kepada Baratha yang akan dinobatkan menjadi raja di kerajaan

Ayodya, bahwa tugas seorang pemimpin adalah bagaimana seorang pemimpin bisa memberikan perlindungan, pengayoman, ketentraman dan kesejahteraan kepada warga masyarakatnya. Pesan ini merupakan pesan moral yang bernilai sangat tinggi dan dipedomani oleh seorang raja, untuk mengelola kerajaan. Pada masa kekinian kiranya pesan ini masih relevan untuk dipedomani bagi seorang pemimpin, terutama pemimpin pemerintahan. Dalam *kakawin Nitisastra*, I.4. (dalam Agus Wiadnyana, Made dan Agus Budiadnyana, Gede, 2016) menyebutkan ;

“*Ring jadmadhika meta cittasepping sarwa pingenaka,
Ring stri madhya manohara pria wuwustangde manah kung lulut,
Yan ring madhyani sang pandita mucaptattwopodeca prihen,
Yang ring madhyanikang musuh mucapaken wak cura snghakeri*”.

Artinya :

Orang yang terkemuka harus bisa mengambil hati dan menyenangkan hati orang ; jika berkumpul dengan wanita, harus dapat mempergunakan perkataan-perkataan manis yang menimbulkan rasa cinta birahi, jika berkumpul dengan

pendeta, harus dapat membicarakan pelajaran-pelajaran yang baik, jika berhadapan dengan musuh, harus dapat mengucapkan kata-kata yang menunjukkan keberaniannya seperti seekor singa” (2016 : 50).

Menyimak pernyataan tersebut, maka peranan bagi seorang pemimpin, terutama pemimpin pemerintahan mampu bertindak sebagai seorang pemimpin yang benar-benar mampu bertindak di posisi mana dia berada dan bertindak sebagai seorang pemimpin jika berhadapan dengan musuh sekalipun, serta peranan seorang pemimpin sebagai panutan bawahannya. Pemimpin pemerintahan/pejabat publik, jika mau menerapkan ajaran yang diuraikan di atas, sudah barang tentu pejabat yang bersangkutan akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela, melawan hukum, serta tindakan amoral lainnya, serta tidak ada kemiskinan di masyarakat. Pada umumnya jika seorang pejabat atau pemimpin pemerintahan jika mereka sudah berada pada posisi puncak, mereka lupa pada hal-hal yang berkaitan dengan etika dan kesusilaan. Inilah yang menyebabkan banyak para pejabat publik tersandung pada kasus-kasus yang melawan hukum, apakah itu korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, terjadinya penyelewengan, tindakan amoral/pelecehan seksual, terkena OTT. (Operasi tangkap Tangan) KPK. dan sebagainya.

Maka berkenaan dengan hal tersebut kegunaan dan manfaat budaya lokal, serta ajaran agama yang ada merupakan hal yang sangat penting dan sangat mulia untuk diterapkan oleh setiap orang, lebih-lebih mereka seorang pejabat publik/pimpinan pemerintahan, untuk diaplikasikan di dalam mengawal tata kelola pemerintahan sesuai dengan tugas pokok, peran dan fungsi masing-masing. Budaya lokal sangat besar peranannya jika dikolaborasikan dengan kebijakan pemerintahan untuk diaplikasikan dalam tata kelola pemerintahan.

Hukum “*karma pala*” sebagai pegangan hidup masyarakat Bali dalam bertindak dan berperilaku, merupakan hukum yang sangat ditaati oleh masyarakatnya, termasuk pula para pejabat pemerintahannya, yang merupakan hukum sebab akibat antara perbuatan dan hasil perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yaitu ; apa yang kita perbuat, maka kita akan mendapat hasil dari perbuatan kita sendiri. Baik kita perbuat, maka baik pulalah yang akan kita nikmati. Jelasnya “*karma*” artinya ; perbuatan, sedangkan “*pala/pahala,*” artinya ; buah/hasil. Dengan demikian, “*karma pala*” artinya ; hasil/buah dari suatu perbuatan. Mungkin kita masih ingat akan ucapan “*Barang siapa yang menabur angin, maka dialah akan menuai badai*”, begitu jugadalam ucapan yang lain “*kita menanam ubi,*

maka ubi pula akan kita panen". Puniatmadja Oka (1992) menguraikan, "Segala sebab akan membawa akibat. Segala sebab yang berupa perbuatan akan membawa akibat hasil perbuatan. Segala karma (perbuatan) akan mengakibatkan karma phala (hasil atau phala perbuatan). Hukum rantai sebab dan akibat perbuatan (karma) dan phala perbuatan (karma phala) ini disebut "Hukum Karma". Begitulah hukum karma itu. Mungkin hukum ini bukan berlaku hanya di Bali saja, hukum ini sangat universal ada di mana-mana di setiap daerah. Jika semua umat manusia meyakini akan hukum *karma phala* ini, penulis yakin tidak akan ada kejahatan di muka bumi ini. Begitu pula halnya jika setiap pemimpin atau pejabat publik meyakini akan hukum ini, serta mau mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu berarti mereka sudah melaksanakan bagian dari **revolusi mental** yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Etika kepemimpinan sebenarnya sudah banyak literatur yang menyajikannya, tinggal sekarang tergantung atau kemauan dari pemimpin yang bersangkutan, mau atau tidak untuk menerapkannya. Etika mempunyai kaitan erat dengan "budaya". Dari apa yang penulis uraikan di atas, hanyalah penulis

sajikan berdasarkan kajian akademik, sekarang berhasilnya atau baik buruknya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, tergantung dari para penyelenggara dan penentu kebijakan di pemerintahan daerah itu sendiri.

Sebagai perbandingan dari etika kepemimpinan yang sudah diterapkan di Bali, penulis juga ingin menyajikan tentang etika kepemimpinan yang pernah diterapkan oleh Maha Patih Gajah Mada, ketika Majapahit mencapai zaman keemasannya, yang ditulis oleh Bhre Tandes, dalam bukunya ; *Asta Dasa Kotamaning Prabu, 18 Rahasia Sukses Pemimpin Besar Nusantara Gajah Mada, Ceo Agung Majapahit*, yang antara lain disebutkan ada dua dimensi yang diterapkan oleh Gajah Mada ketika itu, yaitu dimensi moral dan dimensi manajerial. Namun dalam konteks ini penulis hanya menyajikan dimensi moral saja, mengingat dimensi inilah yang sedang mengalami kemerosotan.

Menurut Bhre Tandes (2007), bahwa dimensi moral yang pernah diterapkan Gajah Mada, dalam tata kelola pemerintahan Majapahit, adalah sebagai berikut :

1. *Mantriwira* :

Menegakkan Kebenaran dan keadilan, artinya: seorang pemimpin harus berani membela dan menegakkan

kebenaran dan keadilan, tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun;

2. **Sarjawa Upasama :**

Rendah Hati, artinya; seorang pemimpin harus rendah hati, tidak boleh sombong, congkak, mentang-mentang jadi pemimpin, dan tidak sok berkuasa;

3. **Tan Satresna :**

Bersikap adil dan objektif, artinya ; seorang pemimpin tidak boleh memihak dan pilih kasih terhadap salah satu golongan atau memihak saudaranya, tetapi harus mampu mengatasi segala paham golongan, sehingga dengan demikian akan mampu mempersatukan seluruh potensi masyarakatnya untuk menyukseskan cita-cita bersama;

4. **Sumantri ;**

Tegas, Jujur, Bersih dan Berwibawa, artinya ; seorang pemimpin harus tegas, jujur, bersih dan berwibawa;

5. **Sih Samasta Bhuwana :**

Dicintai dan mencintai rakyat, artinya; seorang pemimpin dicintai oleh segenap lapisan masyarakat dan sebaliknya pemimpin mencintai rakyatnya;

Menurut Gajah Mada pemimpin yang pantas dicintai rakyat, haruslah :

➤ **Abhikamika** : Tampil simpatik, berorientasi ke bawah dan lebih

mengutamakan kepentingan rakyat banyak dari pada kepentingan pribadi dan kelompoknya.

➤ **Ngesti Priambada:** Selalu memberikan rasa kebahagiaan, ketentraman serta kedamaian lahir batin kepada masyarakatnya.

➤ **Kaprihatining Praja:** Mempunyai perasaan belas kasihan kepada bawahan dan berusaha mengadakan perbaikan nasibnya.

6. **Nagara Gineng Pratijna :**

Cinta tanah air dan bangsa, artinya; seorang pemimpin mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi, golongan, maupun keluarga (2007 : 63-71).

Menyimak dari pandangan ini, walaupun itu diterapkan di abad XIII yang lalu, namun dalam kekinian rupanya hal itu masih relevan dan masih cocok untuk disimak dan diimplementasikan oleh pimpinan pemerintahan. Itu adalah nilai-nilai budaya bangsa kita yang mendiami bumi nusantara ini. Tanpa ada kerajaan atau pemerintahan yang kuat di kala itu, yang dijalankan oleh Maha Patih Gajah Mada, kemungkinan tidak ada negara Indonesia yang kitacintai ini, yang ketika itu bernama “Nusantara” . Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa dampak yang sangat signifikan terhadap budaya nusantara,

peninggalan budaya masa lalu, serta situs-situs peninggalan masa lalu yang tak ternilai harganya ditinggal begitu saja dan lebih parah lagi sengaja dirusak/dihancurkan oleh oknum-oknum yang tidak suka akan budaya nenek moyangnya itu dengan dalih membuka lahan untuk perumahan atau perkebunan dan sebagainya. Mereka lebih condong mengadopsi budaya asing yang belum tentu cocok dengan jati diri bangsa nusantara ini.

KESIMPULAN

Implementasi etika kepemimpinan pemerintahan di Bali, selalu mengkombinasikan antara kebijakan pemerintah yang akan diterapkan dengan adat, tradisi, dan budaya lokal (Bali), sehingga masyarakat lokal ikut berperan dan berpartisipasi dalam mendukung program pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan. Budaya lokal Bali yang hidup tumbuh subur akibat pengaruh Hindu dan sangat nyambung dengan budaya masyarakat Bali, perlu dipelihara demi ajegnya Bali, yang selalu mendapat hantaman dari pengaruh budaya luar, apakah itu melalui teroris dan sebagainya.

Filosofi *Tri Hita Karana*, merupakan filosofi Hindu yang telah

membumi di Bali (di Indonesia) masih relevan diaplikasikan di dalam mendukung program-program pemerintah, sehingga mampu mendukung tata kelola pemerintahan, yang baik untuk mempercepat pencapaian tujuan pemerintah mensejahterakan masyarakatnya. Upaya untuk mengejawantahkan itu Pemerintah Daerah Bali, selalu konsen terhadap pembinaan, pelestarian budaya Bali, melalui Desa Pakraman/Desa Adat yang merupakan ujung tombak di dalam menjaga, membina, serta mempertahankan, budaya tradisional Bali, guna disumbangkan dan diberdayakan di dalam mendukung tata kelola pemerintahan, baik di tingkat lokal, nasional bahkan di tingkat global.

Wejangan Sri Rama kepada Baratha di dalam mengemban tugas sebagai seorang raja atau untuk memimpin pemerintahan "*Kesayan Iking Papa Nahan Prayojana*" yang artinya "tugas seorang pemimpin adalah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, kiranya masih sangat relevan dipedomani oleh seorang pemimpin atau pemimpin pemerintahan, sehingga kesejahteraan masyarakat terwujud, terhindar dari kemiskinan, kesengsaraan, gizi buruk, lumpuh layu dan sebagainya.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Agus Wiadnyana, Made dan Agus Budiadnyana, Gede. 2016. *Narasi Niti-Sastra*, CV.Kayumas Agung – Denpasar.
- Bhre Tandes, 2007. *Asta Dasa Kotamaning Prabu, 18 Rahasia Sukses Pemimpin Besar Nusantara, Gajah Mada, Ceo Agung Majapahit*.PT.Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Creswell, John W.2014. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Pustaka Pelajar – Jogjakarta.
- Jenks, Chris, 2013. *Culture Studi Kebudayaan*, diterjemahkan dari CULTURE, oleh Erika Setyawati, Pustaka Pelajar Jogjakarta.
- Montgomery, Cynthia A. 2012. *The Strategist Be The Leader Your Business Needs*, Harper Colins Publishers, London.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta Jakarta.
- Puniatmadja, Oka I.B. 1992.*Dharma Sastra*, Yayasan Dharma Sarathi, Jakarta.
- , 1992.*Panca Crada*. Yayasan Dharma Sarathi, Jakarta.
- Ryaas Rasyid, Muhamad. 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*.Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI), PT.Yarsif Watampone Jakarta.
- Rahyono.2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Penerbit Wedatama widyasastra.
- Sugiyono, 2012.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Suradinata, Ermaya. 2013. *Analisis Kepemimpinan Strategi Pengambilan Keputusan*.Alqaprint – Jatinangor.
- Wirawan, 2013.*Kepemimpinan, Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*, Raja Grafindo Jakarta.

Dokumen :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 y.o. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah,
2. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007Tentang Pedoman Fasilitasi Ormas Bidang Budaya, Keraton dan Lembaga Adat.

Website :

1. [http //www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id)
2. [http//www.balipos.co.id](http://www.balipos.co.id)

3. <http://www.balipos.co.id>
4. <http://www.balipos.co.id>
5. <http://www.papuaindependent.com>
6. <http://www.chass.utoronto.ca/ber/hatoutmal.html>
7. <http://www.balipos.co.id>
8. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kepemimpinan>